

Peran Sekretariat Dewan Dalam Mendukung Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Labuhanbatu

Nurul Fazirah Harahap^{1*}, Siti Aisyah²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Abstract

The DPRD (Regional People's Representative Council) cannot carry out its duties, divide tasks and fulfill everything. Functioning means that the organization does not have the auspices of other people. In this case, employees participate in carrying out and executing the work.

The Regional People's Representative Council Service Center was formed to support and carry out the activities of the Regional People's Representative Council and especially its staff. This means that the structure of the regional government knows that there is a management, among other things, formed from regional leaders and the regional People's Representative Council as partners. Among other things, participation means improving regional government within it. The implementation of regional autonomy discussed adheres to the principle of decentralization, the principle of sharing of powers, and the principle of co-administration. Some public administration tasks are regional in nature, some are managed in an organized manner and remain the responsibility of the state.

This study examines the role of DPRD Secretariat staff in carrying out the sacred duties of its members, especially the functions of legislation, budgeting and supervision. Use qualitative research methods to better describe employee roles. The survey results show that employee discipline still needs to be improved.

Keywords : DPRD Secretariat Staff and DPRD Functions

Copyright (c) 2023 Nurul Fazirah Harahap

✉ Corresponding author :
Email Address : nurulfazirah390@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam suatu organisasi terdapat beberapa faktor yang saling bergantung dan mempunyai pengaruh penting terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Satu diantara yang ada elemen terpenting dalam suatu lembaga adalah sumber daya manusia (human resources). Oleh karena itu, setiap lembaga harus mampu mengendalikan dan mengintensifkan sumber daya manusia yang ada dalam organisasinya. Human resources berarti akibat berperan menggerakkan dan mensintesis sumber daya lain untuk memetik tujuan lembaga (Wirawan 2009:Pertama).

Berarti organisasi yang besar dan kompleks, wakil rakyat khususnya DPRD tidak bisa bekerja sendiri. Anggota Dewan harus didukung berarti insan adapun betul-betul kompeten dan ahli bermakna bidang tertentu, berkualitas perkara yang

berkarakter teknis yang tidak dapat diakses oleh anggota Dewan. Karena manusia pada dasarnya tidak sempurna, di mana ada kelebihan, selalu ada kekurangan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Labuhanbatu yaitu satu diantara lembaga di bawah naungan Pemerintah Bupati Labuhanbatu yang bergerak di bidang kepengurusan DPR. Sekretariat DPRD Labuhanbatu mempunyai visi lima tahun ke depan, yaitu "Tercapainya dukungan administratif yang luar biasa terhadap kegiatan fungsional DPRD". Setwan berharap dengan visi tersebut akan tercipta sdm yang berkualitas dan menjadi pegawai yang profesional dengan menerapkan jiwa kedisiplinan pada setiap individu. Didukung dengan peran teknologi informasi akan menciptakan kesejahteraan bagi sumber daya manusia organisasi. Staf Sekretariat DPRD Pemerintah Labuhanbatu terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain Bagian Umum, Bagian Hukum dan Alat Bantu Dengar, Bagian Program dan Keuangan, serta Bagian Pendukung Bagian Pengangguran.

Dalam melayani tugas dan tanggung jawabnya, anggota DPRD terkadang gagal melayani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, DPRD didukung dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya oleh aparatur DPRD. Untuk mendukung tugas dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan diperlengkapi untuk melaksanakan tugas administratif, membantu kepemimpinan rapat dewan dan mendukung perolehan dan koordinasi tim ahli yang diperlukan untuk Administrasi. Dewan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Moleo ng, 2012), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk lisan atau tulisan dari orang - orang dan perilaku yang diamati. Sumber data artikel ini adalah data primer dan data sekunder. Data utama artikel adalah wawancara dengan staf Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Dan data sekunder artikel ini diambil dari data laporan kehadiran pegawai DPRD Kabupaten Labuhanbatu.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah objek penelitian, tempat berlangsungnya kegiatan penelitian. Penentuan lokasi penelitian merupakan langkah yang sangat penting karena menyangkut klarifikasi siapa subjek penelitian agar permasalahannya tidak terlalu luas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu yang bertempat di JL.S.M. Raja No. 056 Rantauprapat, Provinsi Sumatera Utara.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah pengkajian bagi penghimpunan bahan/bukti. Berarti penkajian ini, ataupun meningkat saksama penelitian kualitatif, penghimpunan butki dijalankan dalam kondisi alamiah. Oleh karena itu, teknik pengumpulan dahan yang dijalankan peneliti diantaranya:

a) Pemeliharaan

Wawancara ialah pembicaraan melalui tujuan yang sama. Diskusi dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan perbincangan dan responden

mengajukan pertanyaan dan responden mewariskan balasan arah pertanyaan tersebut (Widodo, 2017): 50).

Dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan yaitu dengar pendapat langsung tidak terhalang pertanyaan-pertanyaan pemeriksa bukan hanya terfokus atas topik wawancara saja melainkan dapat mendalam atau meluas tergantung situasi dan situasi awal. Wawancara dilakukan dengan pejabat di Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu.

b) Dokumen

Menurut Hamidi, dokumen merupakan informasi dari buku yang penting bagi dunia usaha, organisasi, dan individu. Dokumen penelitian ini merupakan gambaran yang diambil penelaah bagi mendukung buatan penelaah (Fenty Himawati 2017:60).

Dokumen itu seorang diri bisa dirupakan bahan nyata maka konsultasi adapun dijalankan peneliti adalah otentik & bebas dari manipulasi informasi. Mampu digunakan untuk mendukung bukti yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian peranan

Menurut Soerjono Soekanno, tugas ialah sisi bergerak dari jabatan (pangkat), jika seseorang memenuhi hak dan keharusan sesuai dengan jabatannya, maka ia memenuhi peran tersebut. Pemisahan posisi dan peran baik bagi ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. (Agmarina Vica M., 2020).

Sekretariss DPRD

Sekretariat DPRD adalah organ organisasi DPRD dan menunjang tugas dan wewenang DPRD. Sekretariat DPRD dipegang oleh Sekretaris Dewan yang berkewajiban melaksanakan tugas teknis alias di bawah arahan DPRD dan molek administratif berkedudukan kepada Gubernur di bawah pengawasan Sekretariat Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai struktur badan adapun mempermudah pelaksanaan tugas pokok dan kewajiban. (BR Rindengan, F. Tulus dan JM Ruru, 2015).

Berarti melangsungkan beban utama dan tugas, Sekretariat Dewan disusun secara olembaga, sedemikian rupa sehingga pelaksanaan tugas pokok dan tugas tidak semrawut dan memudahkan pelaksanaan tugas. Lapisan lembaga Sekretariat DPRD meliputi:

1. Anggota Umum

- Subbagian umum dan desain
- Suku Dinas Personalia dan
- Subbagian logistic (Perlengkapan)

2. Anggota Persidangan

- Subbagian Pemeriksaan & Pencatatan
- Subbagian peraturan perundang-undangan
- Subbagian bawah dokumentasi

3. Anggota Protokol

- Subbagian aturan
- Subbagian Penyelidikan

- Subbagian manajemen eksekutif
- Anggota Keuangan
- Pembagian anggaran / modal
- Subbagian bendahara
- Subbagian Akuntansi dan Pelaporan

Setelah dibagi menjadi banyak departemen, maka dalam proses pelaksanaan tugas, fungsi pokok juga dibagi menjadi banyak subbagian untuk memudahkan pengaturan dalam proses pelaksanaan fungsi. Departemen Umum mempunyai tugas pokok sebagai Sekretaris Departemen Umum. Dewan bertanggung jawab untuk mendukung masalah administrasi umum, personel dan peralatan. Untuk menyelesaikan tugas pokoknya, departemen administrasi bisnis mempunyai fungsi.

Pengertian DPRD

DPRD adalah badan perutusan rakyat daerah yang berfungsi menjadi lembaga pengatur penguasa daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3:

“Pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat daerah adapun warga dipastikan lewat pemilihan umum.” DPRD terus disusun berserang liat beserta undang-undang, terakhir UU Nomor 17 Tahun 2014. Badan ini disebut Majelis Nasional karena kata “berbicara” artinya berbicara, artinya mengungkapkan kebaikan rakyat, yang kepribadian setelah menyatakan dengan jelas & mengagitasi kemurahan hati rakyat, maka harus dibicarakan dalam sidang nasional. kekuasaan pusat. pemerintah sedang berkuasa. Maka, Dewan Perwakilan Rakyat bentuk turunan lain untuk mengkritik pemerintah pusat, dan di daerah untuk mengkritik pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, tergantung pada tingkatannya.

A. Sejarah berdirinya DPRD Kabupaten Labuhanbatu

Pada bulan Maret 1946, Panitia Keresidenan Nasional Sumatera Timur mengadakan sidang paripurna di Jalan Suka Mulia No. 13 Medan yang antara lain memutuskan agar Panitia Keresidenan Nasional Sumatera Timur berubah bentuk menjadi lembaga legislatif sehingga terbentuklah Sumatera Timur. menjadi enam bupati di Kabupaten Langkat, Deli Serdang dan Karo. Simalungun, Asahan dan Labuhanbatu.

Pada tanggal 2 Oktober 1945, Teuku Muhammad Hasan diangkat menjadi Gubernur Sumatera, terus pada tanggal 3 Oktober 1945, Gubernur Sumatera mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan para wakil daerah dan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin daerah. Membuat komite nasional regional. Terus keadaan yang berserang memburuk pada saat itu alias sebelum invasi pertama, maka ibu kota Sumatera Timur dipindahkan dari Medan ke Tebing Tinggi, dan pada tanggal 26 Juni 1946, legislatif Sumatera Timur mengadakan rapat. dan Papatu. mengangkat dan melantik enam gubernur baru Karesidenan Sumatera Timur

dan melantik Vedana, termasuk Gouse Gautama, yang presidennya Taman Siswa Kisaran menjadi gubernur Labuhanbatu yang pertama.

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Timur tanggal 26 Juni 1946 yang diparaf Pemang Siantar & mulai berlangsung pada tanggal 1 Juli 1946, mengukuhkan keputusan legislatif tentang status Sumatera Timur. Pada masa itu disebut masa Panitia Penyusunan, yang pertama adalah Tagor Esra. Pada tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 1946, dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Labuhanbatu dengan susunan anggota antara lain Presiden Abdul Manan Malik, Wakil Presiden Sordang Siregar, Sekretaris Arifin Siregar, anggota Abdul Rahim Ja'far, Rusli Sihombing, Mardan, A. Mursyd Ja' ter. , Jacob Daulay, H. Solehuddin, Badul Wahid, Abdul Hakim Yunus dan Rahim Yusuf.

Analisis Ritual/Upacara sederhana di hadapan Dewan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 2 Juli 1946 di kediaman Bupati Labuhanbatu, Gouse Gautama terpilih sebagai Bupati Labuhanbatu. Terus imperative bahwa Wedana dipilih oleh Gubernur Sumatera diantara 4 Kewedanaan yaitu Bapak Sarijan Wedana Kualuh Leidong, Dahlan Ganafiah Wedana Kota Pinang, Bapak Samin Pakpahan Wedana Bilah dan Usman Efendi Wedana Panai.

B. Tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu

Tugas pokok Sekretaris DPRD adalah menolong bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kemudahan pelayanan administrasi dan menunjang tugas dan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pekerjaan umum, program dan keuangan, pengujian. dan peraturan perundang-undangan, memudahkan penganggaran dan pengawasan untuk membantu implementasi karya dan misi DPRD dengan sebaik-baiknya. Keuangan daerah dan pelaksanaan tugas teknis operasionalnya menjadi kewenangan DPRD & berkewajiban kepada DPRD serta bertanggung jawab molek administratif terhadap bupati lewat Sekretariat Daerah.

C. Tinjauan Umum Tentang DPRD

Dprd ialah lembaga perwakilan rakyat daerah adapun beranggotakan anggota partai politik pengikut pemilihan umum (pemilu) yang ditentukan berlandaskan buatan pemilihan umum. DPRD merupakan salah satu organisasi pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengamatan.

Fungsi legislasi kembali dikaitkan dengan penyusunan peraturan daerah (perda) yang ambisius dan responsif. Dalam arti peraturan daerah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan, kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini tidak bisa dicapai jika mekanisme pembuatan peraturan daerah (perda) bersifat eksklusif dan tertutup. Oleh karena itu, mekanisme pembuatan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin DPRD harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi aspirasi masyarakat secara optimal. Fungsi anggaran merupakan

kewenangan DPRD untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang efektif dan efisien, serta terdapat hubungan kesesuaian yang logis antara keadaan kemampuan keuangan daerah dengan hasil kinerja pelayanan masyarakat.

Fungsi pengawasan merupakan lembaga yang bertanggung jawab memantau pengamalan kebijakan wilayah dan anggaran dasar beserta kebijaksanaan pemerintah lainnya, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kawasan yang transparan dan bertanggung jawab, baik dalam proses pemerintahan maupun di bidang penganggaran.

Untuk melaksanakan ketiga fungsi ideal tersebut, DPRD mempunyai sumber modal dasar yang cukup besar dan kuat, yaitu tugas dan wewenang, perangkat DPRD, hak DPRD/anggota, dan anggaran mandiri DPRD. Ketiga fungsi ini harus dijalankan dengan benar.

Peran Sekretariat bermakna menunjang kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

A. Disiplin Pekerja (Pegawai) demi mendukung kerja Dewan Perwakilan Masyarakat, maka disiplin pekerja atau pekerja adalah sebagai berikut:

1. Jalan pagi
2. Apel siang
3. Daftar Pengakuan Karyawan
4. Daftar Periksa Kinerja Karyawan
5. Kinerja karyawan

Untuk mengetahui sejauh mana kedisiplinan staf (pegawai) sekretaris dewan mendukung kerja DPRD, maka peneliti akan mengetahui hasil wawancara tentang kedisiplinan staf yang sangat penting dalam mendukung kerja DPRD, yang akan disajikan dibawah – bawah. Hasil survei.

Menurut Bapak Ventje (48 tahun), Direktur Departemen Umum, staf Sekretariat Dewan, dalam proses pelaksanaan tugas kedisiplinan, pegawai sendiri harus berhati-hati, karena pekerjaannya akan sangat berat. Segala sesuatu akan mudah dilakukan dengan baik jika karyawan spesialisasi bermakna semua hal dn memiliki etos kerja yg tinggi. barangkali halnya para pegawai Dirjen yang dipimpinnya langsung, semua orang menunjukkan kedisiplinan dan etos kerja. Menurut Pak Ventje, pada setiap panggilan pagi dan sore, tidak ada seorang pun yang terlambat untuk panggilan pagi atau sore. Beliau (Pak Ventje) juga mengatakan, menelpon pada sore hari juga penting karena Anda akan mengetahui apakah karyawan tersebut akan pulang sebelum jam kerja berakhir.

Agar karyawan dapat bekerja secara efektif, kami juga memberikan contoh cara bekerja bagi karyawan agar mereka dapat melakukannya. “Jadi kita bisa melihatnya,

kata Pak Ventje. Pemimpin harus berusaha untuk memastikan bahwa karyawan mereka memiliki motivasi yang tinggi. Namun jika melihat hasil survei di daerah, memang benar adanya himbauan dari jajaran Sekretariat Dewan untuk menjawab panggilan pagi (morning call), yakni hadir tepat pd waktunya sesuai jadwal kerja. Begitu pula pada rapat sore, staf Sekretariat Dewan masih pulang larut malam, namun evaluasi kinerja staf sangat baik, bahkan memberikan skor kepada staf Sekretariat Dewan sebesar 100. Susahnya masalah peneliti, pegawai Dewan hanya saja bisa bekerja. Sebaiknya terdapat rapat, rapat paripurna khusus Kabupaten labuhanbatu untuk melaporkan & melaksanakan tanggung jawab masing-masing bupati. Oleh karena itu, menurut peneliti/penulis, pegawai Sekretariat Dewan diberikan pelatihan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya.

SIMPULAN

Sekretaris Daerah yaitu sekretaris Dewan Perwakilan.,Rakyat Daerah, sekretaris dewan yng merupakan PNS dan disetujui bertugas di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Labuhanbatu ataupun yang bertugas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dari observasi terdapat dilaksanakan, penulis dpt meringkaskan bahwasanya:

Kepatuhan semakin meningkat dan terutama pengelolaan pegawai oleh manajemen semakin menguat, sehingga kinerja pegawai yang melakukan pekerjaannya dengan baik menjadi alasan mengapa kedisiplinan sangat penting bagi pegawai, karena jika pegawai dilatih bahwa pekerjaannya akan lebih baik.

Sebagai pegawai, meski memenuhi seluruh kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kinerjanya bisa ditingkatkan sehingga dalam menunjang kerja legislatif, pegawai sanggup melaju cermat dalam menyiapkan tenaga ahli di bidang penegakan hukum. . Kami juga mengharapkan mereka untuk lebih sering berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan.

Sekalipun tidak terlibat langsung dalam implementai proyek anggaran,. diinginkn pejabat daerah dapat mendukung proyek anggaran secara efektif dengan mencatat hasil penetapan anggaran dan anggaran daerah.

Referensi :

- Gie The Lirang, dkk, 198. Ensiklopedia Administrasi. Yogyakarta. PT Gunung Agung Handoko,
1986 Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung
Hikmawati, Fenti. 2017. Metodologi Penelitian. Depok : Rajawali Pers.
Juru, N. A. (2020). Analisis Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 4(2), 408- 421.
Kojongian, R. N. Peranan Staf Sekretariat Dewan dalam Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon1. Politico: Jurnal Ilmu Politik, 2(6), 1065
Mayelsa, Agmarina Vica. 2020. Peran Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri

- dalam Pemberdayaan Anak Yatim melalui Program Mandiri Enterpreneur Center (MEC) di Surabaya. Surabaya. Skripsi Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Moleong, J Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:Remaja Rosydakarya, 2003.
- Nawawi Hadawi, 1994 : Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara Bandung.
- Ndraha Taliziduhu, 2003, Kybernologi (ilmu pemerintahan baru), Jilid I, Rineke Cipta Jakarta,
- Poerwadaraminta, W.J.S. 1985 Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka
- Pringgodigdo, dkk. 1997. Ensiklopedia Umum. Jakarta, Yayasan Kanisius.
- Ramadhanti, R. (2018). PERAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENUNJANG KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 248-266
- Raufur, A. Tafaur Salamun. 2016. Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar. Skripsi Universitas Hasanuddin.
- Rindengan, B. R., Tulusan, F., & Ruru, J. M. (2015). Peranan Sekretariat Dprd dalam Mendukung Fungsi Dprd (Studi di Skretariat Dprd Kota Tomohon). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(32).
- Rosdalina. 2016. Kedudukan dan Peran Sekretariat Dewan dalam Menunjang Kinerja DPRD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015. Yogyakarta. Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Sarundayang, Babak baru Sistem Pemerintahan Daerah, 2005, Kata hasta, Jakarta
- Sarwoto, 1996. Efektivitas Organisasi, Jakarta Erlangga.
- Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Alfabeta, Bandung.
- Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Profil Sekretariat DPRD.
- Widodo. 2017. Metodologi Penelitian. Jakarta : Rajawali Pers.
- Wusanto IG, 1989, Dasar-dasar Managemen Umum, Jakarta; Pustaka Dian Cetakan Ke-3.